

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Kalimantan Selatan 2024 Capai Rp 11,4 Triliun



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/426327/rapbd-perubahan-kalsel-2024-capai-rp114-triliun>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2024 sebesar Rp11,4 triliun atau meningkat sekitar Rp1 triliun dibanding APBD Murni 2024.

Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar menyampaikan hal itu saat Pengantar Nota Keuangan RAPBD-P 2024 pada Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel Karmila di Banjarmasin, Rabu.

"Struktur RAPBD-P Kalsel 2024 secara umum Pendapatan Daerah sebesar Rp11,4 triliun dan Belanja Daerah Rp13,1 triliun," kata Roy.

Roy menuturkan APBD-P 2024 fokus melanjutkan pembangunan yang belum selesai pada APBD 2024 murni dan menunjang program Kalsel maju.

Secara umum atau garis besar fokus pada APBD-P 2024, diungkapkan Roy, antara lain dengan skala prioritas pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan pendidikan.

Selain itu, peningkatan infrastruktur dasar, peningkatan perekonomian dan hilirisasi industri.

"Pada prinsipnya pembangunan Kalsel untuk kesejahteraan masyarakat dan warga Kalsel tidak ada yang tak sejahtera pada masa mendatang," ungkap Roy mewakili Paman Birin.

Usai Rapat Paripurna, Sekdaprov Kalsel membuka turnamen tenis meja terbuka yang diselenggarakan Press Room DPRD Kalsel bekerja sama dengan Sekretariat Daerah (Setwan) Kalsel.

Sekda Provinsi Kalsel membuka kompetisi tersebut didampingi Sekretaris DPRD (Sekwan) Kalsel Muhammad Jaini.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/426327/rapbd-perubahan-kalsel-2024-capai-rp114-triliun>, 21 Agustus 2024.
2. <https://www.borneonews.co.id/berita/356871-rapbd-perubahan-kalsel-2024-capai-rp114-triliun-untuk-kesejahteraan-masyarakat>, 21 Agustus 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
- Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
- Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Struktur APBD

